

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA GURUN TELAGA BIRU

Darmanto<sup>1</sup>, Meita Istianda<sup>2</sup>, Faizal Madya<sup>3</sup>

Universitas Terbuka Banten<sup>1,2,3</sup>

[darmanto@ecampus.ut.ac.id](mailto:darmanto@ecampus.ut.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan program Desa Wisata Gurun Telaga Biru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam rangka pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru tidak bersifat menyeluruh untuk seluruh lapisan masyarakat karena pengembangan Desa Wisata tersebut dikelola oleh sekelompok masyarakat yang bekerja bersama atau dikoordinir oleh BUMDes Desa Busung, Kabupaten Bintan. Bentuk hubungan kerja di antara anggota kelompok bukan bersifat top down tapi memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam bentuk pemikiran atau saran pengembangan desa wisata tersebut. Simpulan penelitian ini diharapkan BUMDes lebih intens dalam mendorong partisipasi khususnya anggota kelompok dalam pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru agar pendapatan dari anggota masyarakat dapat lebih meningkat karena dampak dari wabah Covid-19 menyebabkan aktivitas pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru kurang optimal.

**Keywords:** Desa Wisata, Partisipasi, Pengembangan Desa Wisata

### ABSTRACT

*This study aims to study how community participation in the development of the Telaga Biru Desert Tourism Village program. This study uses a qualitative method. The results of the study show that participation in the development of the Telaga Biru Desert Tourism Village is not comprehensive for all levels of society because the development of the Tourism Village is managed by a group of people who work together or are coordinated by BUMDes of Busung Village, Bintan Regency. The form of working relationship among group members is not top-down in nature but provides an opportunity for group members to participate in the form of ideas or suggestions for the development of the tourism village. The conclusion of this research is that it is hoped that BUMDes will be more intense in encouraging participation, especially group members in the development of the Telaga Biru Desert Tourism Village so that the income of community members can be further increased because the impact of the Covid-19 outbreak has caused the development activities of the Telaga Biru Desert Tourism Village to be less than optimal.*

**Keywords :** Participation, Tourism Village, Tourism Village Development

## **PENDAHULUAN**

Era otonomi daerah memberikan keleluasaan sekaligus menuntut setiap pemerintah daerah untuk lebih mandiri dan kreatif mencari berbagai peluang yang dapat digunakan sebagai sumber pemasukan kas daerah. Kondisi alam dan budaya yang berbeda-beda menyebabkan setiap pemerintah daerah mempunyai strategi masing-masing untuk mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Salah satu bidang yang menjadi andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya adalah bidang pariwisata khususnya desa wisata. Pada dekade belakangan ini banyak daerah yang berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD) melalui pengembangan desa wisata dimana desa wisata dianggap memiliki potensi yang besar dalam pengembangan wisata Indonesia (Suharjono, 2019). Melalui pengembangan desa wisata maka akan memberikan dampak yang cukup besar untuk kemajuan desa menjadi lebih mandiri dan berkembang (Kemendes PDTT, 2019).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber potensi desa, baik yang berbentuk keindahan alam maupun keunikan budayanya (Imron, 2015). Dari hasil penelitian Hermawan (2016) pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal, seperti meningkatnya kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal serta kebanggaan untuk bekerja dan berusaha di desanya sendiri, meningkatnya penghasilan masyarakat, meningkatnya peluang kerja dan berusaha masyarakat lokal, serta pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah, dkk. (2019) menyangkut persepsi terhadap keberadaan desa wisata,

ditemui hasil bahwa persepsi pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan mahasiswa pada umumnya positif dimana keberadaan desa wisata tersebut telah memberikan manfaat yang besar yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dampak dari kegiatan pengembangan desa wisata tidak hanya menyangkut aspek positif saja tapi juga aspek negatif, salah satunya adalah permasalahan sampah sebagai efek dari kunjungan wisatawan ke daerah wisata tersebut. Hasil penelitian dari Raharjo & Wibowo (2016) menunjukkan bahwa untuk dapat mempertahankan berjalannya kegiatan pengelolaan sampah, maka diperlukan adanya dukungan pemerintah desa dalam hal menyediakan fasilitas penunjang untuk memberikan kemudahan terhadap kegiatan pengelolaan sampah tersebut. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah diindikasikan dengan adanya kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri.

Pembangunan pariwisata tidak dapat dilaksanakan secara parsial saja baik oleh dinas pariwisata, pemerintah daerah, pemerintah desa, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun memerlukan peran serta dan partisipasi masyarakat yang terkait dengan pengembangan desa wisata tersebut. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata dapat dilihat dari sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan pariwisata. Seperti yang disampaikan oleh seorang peneliti bahwa agar masyarakat ikut serta dan berpartisipasi dalam mewujudkan dan melaksanakan pengembangan kawasan

ekowisata maka semua pihak terkait harus saling mendukung dan memberikan pengertian bahwa program ini adalah program bersama demi membangun wilayah tersebut (Nurpeni, 2015).

Hasil penelitian dari Nurohman & Qurniawati (2019) secara spesifik menyebutkan bahwa pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian di dalamnya melalui forum-forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat. Usaha pengembangan wisata yang didukung oleh masyarakat akan memberikan dampak positif yang jauh lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan dampak negatifnya (Jalunggono, 2018). Untuk menjamin pengembangan desa wisata dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka peran pemerintah perlu dikurangi dalam pengembangan desa wisata dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Dewi, 2013).

Hasil penelitian Febrianingrum, Miladan & Mukaromah (2019) menunjukkan bahwa partisipasi serta peran masyarakat yang aktif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan pariwisata pantai di Kabupaten Purworejo. Pemerintah tidak dapat mengabaikan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Rohmadin (2016) diketahui bahwa agar kegiatan-kegiatan dapat lebih mudah dilaksanakan diharapkan pemerintah mampu mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam pengembangan pariwisata. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat, maka akan lebih terjamin kesesuaian program

pengembangan dengan aspirasi masyarakat setempat serta masyarakat akan merasa dihargai dengan keikutsertaan. Kajian dari Hardiansyah, Syamsumarlin & Marhadi (2019) menunjukkan persepsi masyarakat yang positif terhadap pengembangan desa wisata dengan ditunjukkan adanya peran keterlibatan tokoh adat serta keterlibatan dari beberapa lapisan masyarakat guna lebih mengembangkan destinasi pariwisata setempat.

Salah satu pemerintah daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dalam rangka menyumbang pendapatan asli daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Bupati Bintan, dari lima sektor terbesar dalam produk domestik regional bruto Kabupaten Bintan, yang memberi kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sektor pariwisata (Panama, 2018, April). Oleh karena pentingnya sektor pariwisata maka secara khusus pemerintah daerah Kabupaten Bintan mengembangkan Desa Wisata (Renstra Dinas Pariwisata Kab. Bintan 2016-2021), salah satunya adalah Gurun Pasir Telaga Biru yang terletak di Desa Busung, Kecamatan Sri Koala, Kabupaten Bintan. Kawasan Gurun Pasir Telaga Biru tersebut pada awalnya merupakan kawasan yang terbengkalai karena dahulunya merupakan lokasi penambangan pasir bauksit yang akan diekspor ke Singapura, disulap dan dimanfaatkan oleh warga setempat sehingga menarik untuk dikunjungi wisatawan. Karena sudah terbengkalai cukup lama selama bertahun-tahun menyebabkan pasir-pasir di lokasi tersebut menjadi keras seperti karang. Di lain sisi cekungan-cekungan bekas galian terisi oleh air hujan melalui suatu proses yang lama yang menyebabkan telaga

tersebut berubah menjadi warna biru kelautan (Bintan, 2019).

Rencana pengembangan pariwisata termasuk pengembangan desa wisata di Kabupaten Bintan, ditemui hambatan dan kendala terkait peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Renstra Dinas Pariwisata Kab. Bintan 2016- 2021). Pengembangan dan pengelolaan desa wisata memerlukan keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pihak (stake holder). Kerjasama pemerintah, swasta serta partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan desa wisata sehingga masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan desa wisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Juddin, 2019).

Stacey (2003) mengutarakan partisipasi sebagai suatu proses aktif dari manusia yang terlibat bersama-sama dalam suatu kegiatan. Partisipasi mencakup baik tindakan maupun hubungan-hubungan di antara mereka yang terlibat dalam suatu kegiatan. Partisipasi merupakan suatu proses yang dicirikan dengan adanya saling mengakui sebagai sumber identitas. Identitas dekonstruksi melalui hubungan partisipasi. Partisipasi tidak sekedar hanya keterlibatan dalam bekerja, namun dalam partisipasi terdapat identitas kita yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Untuk mengoptimalkan partisipasi individu maka perlu dikembangkan suatu forum untuk menciptakan dialog diantara individu-individu tersebut dan mendorong individu memiliki motivasi untuk bertindak dalam mendukung pelaksanaan program tersebut (Denhardt, 2007).

Sebagai suatu kontinum maka partisipasi dimulai dari aktivitas penyampaian informasi terkait dengan

suatu obyek permasalahan kepada publik, dilanjutkan dengan tahap mendengarkan apa yang disampaikan oleh publik. Tahap berikutnya adalah terlibat dalam pemecahan masalah yang sedang dibahas berbagai pihak, dan kontinum terakhir adalah mencari titik temu kesepakatan dari berbagai pihak yang terlibat sehingga tujuan dapat tercapai. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan mengandung unsur-unsur perhatian, kebutuhan, dan nilai-nilai publik dalam rangka mencapai kesepakatan untuk menyelenggarakan program yang telah direncanakan sebelumnya. Creighton (2005) mengidentifikasi unsur-unsur utama dari partisipasi yaitu: (1). *The public should have a say in decisions about actions that affect their lives.* (2). *Public participation includes the promise that the public's contribution will influence the decision.* (3). *The public participation process communicates the interests and meets the process needs of all participants.* (4). *The public participation process seeks out and facilitates the involvement of those potentially affected.* (5). *The public participation process involves participants in defining how they participate.* (6). *The public participation process provides participants with the information they need to participate in a meaningful way.* (7). *The public participation process communicates to participants how their input affected the decision.*

Menurut Asian Development Bank (2012) prinsip utama dari partisipasi adalah: (1). *Promote accountability and transparency: Participatory mechanisms hold decision makers accountable to their stakeholders. They promote communication and openness about activities, and transparency in the objectives of participation and degree of*

*stakeholder influence. (2). Allow for participation at all levels: People participate at all levels of decision making (policy, program, and project) through timely, flexible activities that suit their skills, abilities, and interests. (3). Make participation accessible to all: All people are valued equally, opportunities for participation are adequately communicated and offered fairly, and barriers that stop groups getting involved are challenged. (4). Value diversity: The diversity of people's experiences, backgrounds, beliefs, and skills offer a unique resource for society. Celebrating and capitalizing on this is key to participation. (5). Ensure participation is voluntary: People involve themselves in decision making because they believe in the importance of issues at stake and that their participation will make a difference. Avoid coercion. (6). Encourage stakeholders to create their own ideas and solutions: In community-led participatory approaches people act themselves in ways they choose.*

Dari berbagai kajian mengenai partisipasi tersebut maka konsep partisipasi yang tepat untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau adalah konsep yang diberikan oleh Asian Development Bank. Konsep tersebut sesuai dengan kondisi pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru di Kabupaten Bintan karena menyangkut partisipasi masyarakat terkait dengan potensi pendapatan masyarakat dan kepentingan masyarakat yang berada di wilayah Desa Busung, Kecamatan Sri Koala, Kabupaten Bintan.

Berbagai peran pemerintah daerah dianggap sangat potensial dalam mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang

berhubungan dengan desa wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo & Wibowo (2016) menunjukkan peran pemerintah desa dalam mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat desa dengan tujuan memberikan pemahaman dalam pengembangan desa wisata. Peran pemerintah desa lebih pada aspek pemberdayaan masyarakat desa. Di sisi lain Raharjo & Wibowo (2016) meneliti tentang pengelolaan sampah di Desa Ciburial, dengan hasil sebagai berikut: (a). Pemberdayaan personal, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap personal anggota masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan baru. (b). Pemberdayaan kelompok kecil, dengan melakukan pemberdayaan ditujukan kepada Ibu-ibu PKK serta Karang Taruna oleh komunitas Bengkel Awi dan Batur Ulin, ataupun juga dari pemerintah setempat. (c). Pengorganisasian masyarakat, bahwa masyarakat berperan utama dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini. Hal ini pula terkait dengan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat. (d). Kemitraan, bahwa kemitraan ini dilakukan dengan mencari jaringan seperti CSR perusahaan-perusahaan juga dengan kementerian yang terkait dengan bidang pengelolaan sampah. (e). Aksi sosial dan politik, bahwa dengan menjalankan proses pengelolaan sampah dimulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi secara bersama dengan mengandalkan sumber daya manusia setempat di Desa Ciburial.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurpeni (2015) tentang pengembangan kawasan ekowisata di Kelurahan Sei Mempura, Kabupaten Siak, menunjukkan bahwa:

“Agar masyarakat ikut serta dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan dan melaksanakan pengembangan kawasan ekowisata di kelurahan Sei Mempura, maka semua pihak terkait harus saling mendukung dan memberikan pengertian bahwa program ini adalah program bersama demi membangun wilayah tersebut. Dengan begitu, maka, program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Selain itu Konsekuensi dari dukungan masyarakat untuk mewujudkan pengembangan kawasan ekowisata adalah merupakan pengorbanan masyarakat baik dari segi material maupun immaterial. Sementara, sisi positif yang dapat diambil adalah dari segi ekonomi; adanya kawasan ekowisata akan membuka peluang kerja dan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi sangat penting dalam pengembangan desa wisata dimana hasilnya dapat diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Di sisi lain hasil penelitian dari Imron (2015) diketahui bahwa sistem pengelolaan desa wisata perlu dioptimalkan dengan partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

“Sistem pengelolaan Desa Wisata perlu diperkuat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata ini. Partisipasi Pemerintah daerah diharapkan difokuskan pada penguatan kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola desa wisata, memperkuat pemahaman masyarakat setempat terhadap potensi budaya yang dimiliki, serta mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bangli untuk mengembangkan Desa Adat Pengelipuran sebagai Desa Wisata dalam rangka meretas jalan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat maupun peningkatan Pendapatan Asli.”

Penelitian tersebut mengungkapkan pentingnya penguatan sumber daya manusia dalam pengelolaan desa wisata dimana peran pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung program tersebut. Peneliti lain, Hermawan (2016) menjelaskan dampak positif dari pengembangan desa wisata, sebagai berikut:

“Dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran, diantaranya: Meningkatnya penghasilan masyarakat Desa Nglanggeran; Meningkatnya peluang kerja dan berusaha masyarakat lokal di sektor pariwisata; Dengan adanya peraturan lokal yaitu pembatasan investasi asing yang masuk berdampak pada meningkatnya kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal serta kebanggaan untuk bekerja dan berusaha di desanya sendiri; Pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata.”

Meningkatnya pendapatan masyarakat dapat diperoleh dari penyelenggaraan program pengembangan desa wisata sehingga pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi yang dimiliki di wilayahnya, termasuk program pengembangan desa wisata. Karena sangat pentingnya partisipasi masyarakat terkait dengan pengembangan potensi desa wisata maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Gurun Telaga Biru di Desa Busung, Kecamatan Sri Koala, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Gurun

Telaga Biru di Desa Busung, Kecamatan Sri Koala, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan dari Kepala Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan dari anggota masyarakat. Sumber data penelitian ini diantaranya sumber data primer dan sekunder meliputi data hasil wawancara mendalam, dokumen, dan data pendukung lainnya. Analisis data kualitatif dilaksanakan dari beberapa tahapan yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

Salah satu tujuan wisata yang sangat indah dan yang sudah tidak asing lagi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan lebih tepatnya di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam adalah wisata gurun pasir dan telaga biru. Lokasi obyek wisata ini sendiri berjarak sekitar 22 km dari Kabupaten Bintan. Hamparan pasir seluas 6.000 hektar ini tidak seperti gurun di Timur Tengah namun berbentuk gundukan cukup keras dan di daerah gurun pasir tersebut terdapat kolam atau telaga dengan airnya yang berwarna biru. Kolam tersebut tidak dibuat oleh manusia tapi merupakan bekas galian penambangan pasir bauksit yang sudah tidak aktif lagi sehingga terbentuklah kolam yang sangat indah. Warna air telaga tersebut cukup jernih serta dipengaruhi oleh campuran tanah liat yang ada di dasar telaga. Setelah penambangan pasir dihentikan sekitar tahun 1980 an, maka lokasi tersebut tidak terawat lagi. Setelah puluhan tahun hanya dibiarkan saja maka oleh warga sekitar lokasi Desa Busung

lokasi tersebut dikelola menjadi tempat wisata sampai sekarang. Pengembangan desa wisata Gurun Telaga Biru dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan tapi pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat yang tertampung dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata gurun telaga biru tertampung dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berdasarkan PP No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pasal 4 menyebutkan bahwa dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip: a). profesional; b). terbuka dan bertanggung jawab; c). partisipatif; d). prioritas sumber daya lokal; dan e). berkelanjutan. Aspek yang penting dari pasal 4 tersebut adalah menyangkut aspek partisipatif dimana yang dimaksud dengan "partisipatif" pada pasal 4 tersebut adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya. Melalui peran masyarakat melalui partisipasi mereka maka diharapkan perencanaan dan keputusan diharapkan dapat ditetapkan. Di sisi lain melalui partisipasi dapat diperoleh berbagai informasi yang tidak dapat diperoleh melalui saluran formal, dan masyarakat mendapat pencerahan mengenai ketrampilan dalam menangani masalah yang muncul di internal komunitas mereka sendiri. *The purposes of public participation are: (1) to enhance public acceptance of planning decisions; (2) to provide a source of data for planning*

*activities; and (3) to educate the public so that they will acquire skills that can be used to deal with planning problems in their own communities (Sewell, 1979). Participation means true engagement with citizens in the business of government, and actual collaboration with citizens in the design of government programs (Lathrop, 2010).*

## **PEMBAHASAN**

Menurut Asian Development Bank (2012) prinsip utama dari partisipasi adalah: 1) *Promote accountability and transparency*; 2) *Allow for participation at all levels*; 3) *Make participation accessible to all*; 4) *Value diversity*; 5) *Ensure participation is voluntary*; and 6) *Encourage stakeholders to create their own ideas and solutions*.

### ***Promote Accountability and Transparency***

Jika membicarakan permasalahan akuntabilitas suatu program atau kegiatan maka tidak terlepas dari aspek transparansi dimana *in fact, accountability is impossible without transparency (Sharma, 2014). One way to improve local participation and strengthen resilience and responsiveness of local public sector is to make the process of budgeting and financial transactions transparent (Litvack, 1998).*

Dalam penyelenggaraan pengelolaan Desa Wisata Gurun Telaga Biru pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pengelola desa wisata untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan Pemerintah Daerah (PEMDA). Informasi yang disampaikan oleh sekretaris BUMDes (Azroy, informan) sebagai berikut:” Ada upaya PEMDA untuk mengumumkan tempat wisata, soalnya kita pernah juga diundang pertemuan dari pemerintah”. BUMDes maupun pemerintah daerah perlu penekanan

pentingnya mengevaluasi program yang diikuti oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat perlu diperhatikan sehingga masyarakat tidak terpinggirkan dalam kegiatan partisipasi program. *Citizens, however, are seldom given the opportunity to evaluate participation programmers and their needs have rarely been considered in evaluations conducted by agencies or their advisors (Sewell, 1979).*

*Transparency is of great value in informing citizens and helping them hold legislators accountable. But transparency isn't enough. Citizens shouldn't have to play watchdog for their legislators (Lathrop, 2010).* Dari pendapat Lathrop dan Ruma tersebut dapat diambil informasi bahwa untuk aspek lain terkait dengan partisipasi publik maka dalam taraf tertentu publik perlu lebih berani untuk mengawasi perilaku aparatur pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Hasil penelitian terkait dengan pengelolaan desa wisata, BUMDes yang dimiliki menjadi instrumen penting dalam pengelolaan desa wisata dan melalui BUMDes pengelolaan manajemen dilakukan lebih profesional berprinsip pada berkelanjutan (Sidik, 2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aktivitas yang diselenggarakan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru diinformasikan dan dilakukan secara akuntabel dan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi melalui BUMDes. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota masyarakat (Akbar):” Informasi yang dilakukan melalui BUMDes tidak ditutup-tutupi selama ini, semua desa termasuk di samping desa Busung ini cukup tahu tentang wisata yang ada dan cukup bagus”. Sebagai bentuk adanya akuntabilitas dan transparansi menurut Ketua BUMDes (Jardaif, informan)

pengelolaan desa wisata Gurun Telaga Biru sudah dilakukan.” Kita pertama sekali, yang jelas ya, kita bicara tahun dulu ya, setiap tahun itu kita akan ada pertanggungjawaban. Itu pasti, setiap tahun harus ada laporan. Itu salah satu kita menyampaikan apa saja kegiatan dalam satu tahun”. Pengelolaan keuangan desa perlu didasari oleh pengelolaan yang bertanggungjawab, berintegritas dan dipercaya, dengan memaksimalkan manajerial desa, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang akan melaksanakan kebijakan-kebijakan desa tersebut, sehingga kebijakan desa akan terlaksana dengan baik dan dapat menjadi desa wisata yang lebih maju (Tedi, 2020). Menurut Kepala Desa Busung (Rusli, informan): “Transparan dalam arti kata, sisi pendapatan itu langsung dikelola, langsung dibagi, dan tidak pernah terlibat oleh pemerintah desa, maupun pemda “

#### ***Allow For Participation at All Levels***

*Governability is directly proportional to participation. Less participation weakens governability* (Sharma, 2014). Tata kelola pemerintahan tidak terlepas dari dukungan partisipasi masyarakat. Dampak dari kurangnya partisipasi masyarakat mengakibatkan lemahnya tata kelola pemerintahan. “*What is the correct participation rate?*” “*It depends.*” *What kind of participation is required for decisions to have the legitimacy needed so that once the institution reaches a decision, it can implement that decision?* (Creighton, 2005).

Tingkat atau level partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah atau penyelenggaraan program menurut Creighton tergantung dari kondisi program atau permasalahan yang sedang

dibicarakan di antara pihak2 yang sedang berembung.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Gurun Telaga Biru hanya bisa dilakukan oleh anggota BUMDes baru keuntungannya atau penghasilan dari tempat rekreasi ditujukan untuk masyarakat secara umum. Sementara, sekarang ini yang diberi kesempatan hanya BUMDes dalam pengelolaan kerjasama dengan pengelola yang ada di situ (Akbar, informan). Masyarakat secara terbuka diberi kesempatan seluas-luasnya dengan mengikuti aturan dengan catatan penduduk asli Desa Busung, namun semua program tetap melalui sistem join dengan BUMDes (Azroy). Dengan demikian pengelolaan dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat tapi tetap dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes. Azas partisipasi, digambarkan dari bentuk kepedulian kelompok pemuda yang dinamai dengan Gerakan Pemuda Pencinta Alam (GEMPA) dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata mulai dari tahapan perencanaan yang dilakukan bersama aparat desa hingga pada tahapan promosi dan pengembangan objek wisata (Fikri, 2020). Hasil wawancara dapat diketahui: “Kalau untuk daripada masyarakat kita, yang di luar daripada kelompok, intinya kita ajak untuk mereka memberikan ruangan pekerjaan kepada mereka. Ya itu otomatis menambah penghasilan bagi mereka, baik untuk itu” (Jardaif, informan). BUMDes tidak bisa kerja sendiri tapi jika ada kelompok masyarakat yang akan melakukan kegiatan harus bergabung kepada BUMDes. Partisipasi dari segala aspek masyarakat terlihat seperti adanya keterlibatan dan peran Karang Taruna desa setempat (para pemuda) yang menjadi petugas pengelolaan desa wisata di lapangan (Sidik, 2015). Di sisi lain,

anggota BUMDes (Mahadan, informan) menyatakan bahwa masyarakat diberi akses untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan wisata Gurun Telaga Biru: “Keuntungan masyarakat ini kan bisa jualan, bisalah dapat untuk makan, dapatlah untuk jualan kalau kita masuk. Kan gitu? Itulah satu keuntungan masyarakat”.

Melibatkan masyarakat setempat atau tokoh masyarakat dalam proses pengembangan kawasan desa wisata (Zakaria, 2014). Pengembangan desa wisata Gurun Telaga Biru dikelola oleh BUMDes dengan dukungan dari Pemerintahan Desa. Desa tidak boleh menggunakan anggaran desa untuk membuat suatu proyek atau program sehingga desa hanya bisa memberikan pertimbangan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik (Rusli, informan).

#### ***Make Participation Accessible to All***

*To ensure participation of weaker sections and equitable allocation of resources to poor and marginalized* (Sharma, 2014). *The degree of equity is the relative degree of representation, that is, the extent to which all potential opinions and values were heard* (Sewell, 1979). Banyak kesempatan untuk masyarakat ikut berpartisipasi. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara adalah selain dari Desa Busung, ada juga dari luar daerah yang ikut berpartisipasi dan ikut andil dalam pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru, seperti penjual buah-buahan. Kemudahan akses informasi kepada masyarakat dimudahkan melalui sarana komunikasi yang memadai khususnya yang berada di wilayah Desa Busung (Akbar, informan).

Masyarakat diberi kesempatan yang sebesar-besarnya dan diberi kemudahan akses untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata Gurun Telaga

Biru, yang penting perlu kerjasama dengan BUMDes. Kerjasama masyarakat dengan BUMDes dapat berupa kerjasama modal ataupun bantuan yang lain. “Yang jelas masyarakat yang punya ide, kita buka peluang untuk menambah ekonomi kerakyatan yang penting ada payung hukumnya“ (Jardaif, informan).

Partisipasi dalam pengembangan desa wisata Gurun Telaga Biru disesuaikan dengan kriteria dan persyaratan (Rusli). Anggota masyarakat yang akan berpartisipasi dipersilakan dengan catatan mengikuti aturan yang diberlakukan oleh kelompok tersebut atau melakukan koordinasi dengan kelompok tersebut. Anggota masyarakat yang mempunyai ketrampilan, keahlian seperti seni budaya dibutuhkan oleh kelompok yang berada di bawah naungan BUMDes yang diatur oleh pemerintah desa dan kabupaten. Tidak ada pembatasan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi sesuai keahlian maupun ketrampilan mereka. Efisiensi partisipasi diperlukan untuk mencapai keputusan tertentu, *however, that high efficiency may not be compatible with the attainment of high levels of citizen involvement or equity* (Sewell, 1979). Perlu dipertimbangkan kapan mengutamakan tingkat keterlibatan dan ekuitas, dan kapan mempertimbangkan efisiensi partisipasi. *Mechanisms for improved participation: public hearings, at which the public can comment on proposed actions, and increased access to information, by issuing reports (for example, environmental impact statements) or establishing information repositories, locations where the public has access to all relevant studies and documents* (Creighton, 2005). Partisipasi publik dapat diwujudkan dengan meningkatkan akses ke informasi kegiatan atau program yang diikutinya, misal dengan membuat laporan dampak aktivitas pembangunan.

Dari pihak BUMDes sendiri sangat mendorong dan menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata Gurun Telaga Biru. Masyarakat Desa Busung selalu diberi lapangan pekerjaan dan membikin usaha di lingkungan desa wisata sesuai dengan keadaan (Azroy, informan). Pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian di dalamnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat yang mengangkat tentang isu dana desa bagi peningkatan perekonomian warga setempat (Nurohman, 2019). Adanya perbaikan dan peningkatan kegiatan pariwisata menjadikan sebagian warga yang tadinya hanya petani kentang mulai merambah bisnis homestay sehingga muncul gagasan untuk belajar bersama warga melalui pertemuan bersama dalam merancang desa wisata secara kolektivitas serta mengelola potensi yang ada di desanya (Raharjana, 2012).

### ***Value Diversity***

Dalam pengembangan partisipasi masyarakat, berbagai komponen dalam kehidupan sosial perlu memahami peran dalam mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat, dan sebaliknya menghindari aktivitas yang melemahkan peran masyarakat dalam berpartisipasi. *Academia, media, and civil society organizations have a great role to play in weakening patriarchal values, ethnic/religious biases and traditional beliefs* (Sharma, 2014). Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh berbagai elemen atau unsur masyarakat. Pengembangan desa wisata Gurun Telaga Biru desa Busung tidak mempermasalahkan keragaman tersebut.

Pemerintah daerah sangat memahami dan menghargai bahwa keragaman pengalaman, latar belakang, keyakinan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat di sekitar kawasan wisata adalah kunci partisipasi (Azroy, informan).

Masyarakat memiliki berbagai keragaman nilai serta norma yang dianutnya, termasuk nilai kepercayaan. Hubungan di antara anggota masyarakat tetap dapat berlangsung dan berkelanjutan dengan adanya saling perhatian, saling percaya, serta penegakan norma kelompok secara efektif. Masyarakat terkadang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan pasar gagal melakukannya karena anggota mereka memiliki informasi penting tentang perilaku, kapasitas, dan kebutuhan anggota masyarakat lainnya (Bowles, 2002). Pengembangan desa wisata Gurun Telaga Biru terkait dengan bidang pariwisata sehingga memerlukan sumber daya manusia yang memahami kepariwisataan. Namun kondisi itu tidak ditemui pada kelompok pengelola pengembang desa wisata Gurun Telaga Biru yang pondasi masyarakatnya kebanyakan nelayan, kebanyakan anggotanya rata-rata nelayan semua (Jardaif). Partisipasi dari berbagai kondisi latar belakang SDM kelompok pengelola yang berbeda dengan bidang pariwisata sudah berjalan hanya langkah selanjutnya adalah mengembangkan potensi sesuai kapasitas kemampuan SDM tersebut. *The important dimension of a programme is the relative degree of representation, that is, the extent to which all potential opinions and values were heard* (Sewell, 1979). *There are many different types of public meetings. Each has value in some circumstances, and each has limitations that make it inappropriate in other circumstances* (Creighton, 2005).

### ***Ensure Participation is Voluntary***

Perlu pengembangan kapasitas sosial maupun peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan suatu program atau kegiatan dalam masyarakat. *Social capacity development means removal of societal and institutional constraints to participation of the poor and the marginalized and making local public administration more interactive* (Sharma, 2014). *The degree of citizen involvement and degree of individual commitment is an important element to be considered because it is closely tied to participant satisfaction* (Sewell, 1979).

Yang mempunyai kelompok dalam mengelola desa wisata Gurun Telaga memang cukup berpartisipasi dan masyarakat juga membantu partisipasi itu dengan cara menampilkan segala aset yang ada di desa untuk diperjualbelikan dan kadang-kadang untuk diperdagangkan di daerah tersebut. Tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Akbar, informan). Perlunya kepercayaan dari warga desa terhadap pemimpinnya yang memiliki cara memimpin yang dinilai sangat bertanggung jawab dan jujur, pekerja keras, ulet, dan adanya anggapan yang dirasakan dimana pemimpinnya memang bekerja untuk kemajuan desa dan warganya (Sidik, 2015).

Masyarakat mau terlibat dalam kegiatan partisipasi pengembangan desa wisata Gurun Telaga Biru. Secara sukarela masyarakat mau berpartisipasi, tidak pernah dipaksa. Dalam kegiatan di masyarakat partisipasi dilakukan secara sukarela dan secara sadar namun di sisi lain kerelaan berpartisipasi tersebut juga disebabkan ada faktor pemicunya yaitu adanya sanksi bagi yang tidak mau berpartisipasi. Pada tahap selanjutnya keterpaksaan dalam berpartisipasi tersebut lama kelamaan menjadi kesadaran secara

sukarela untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok kerja. Banyak masyarakat yang mau terlibat untuk mengembangkan wisata ini (Mahadan, informan). Pengembangan konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mendorong warganya agar lebih berprestasi tanpa ketakutan akan dikucilkan oleh desa adatnya sendiri (Sudibya, 2018). Selama ini masyarakat terbiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan tidak dibiasakan berpartisipasi (Sidiq, 2017).

### ***Encourage Stakeholders to Create Their Own Ideas and Solutions***

Penyelenggaraan pemerintahan khususnya menyangkut pelayanan publik komponen masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Terkadang dalam penyelenggaraan suatu aktivitas kemasyarakatan tidak dapat dilakukan pemerintah, sektor privat, bahkan oleh seorang individu sekalipun. Pengelolaan desa wisata Gurun Telaga Biru dilakukan oleh kelompok yang bekerja sama dengan BUMDes. Dalam proses pengembangan dan pengelolaan desa wisata, pemikiran-pemikiran berupa ide tidak dibatasi dan malahan didukung. Demikian juga tidak ada batasan pemikiran atau ide-ide pengembangan desa wisata. Pemikiran menyangkut bagaimana menarik perhatian para wisatawan, bagaimana agar wisatawan tidur di daerah tersebut untuk beberapa hari, bagaimana membuat wisatawan selama mungkin tinggal di desa wisata, serta ide-ide lainnya diberi keleluasaan untuk disampaikan. Untuk pengelola, intinya tidak ada batasan berkreasi dan berpartisipasi (Jardaif, informan).

*The personal and durable contacts that characterize communities require them to be of relatively small scale, and a preference for dealing with fellow members*

*often limits their capacity to exploit gains from trade on a wider basis* (Bowles, 2002). Walaupun kemudahan atau kelonggaran partisipasi telah diberikan kepada masyarakat namun ada faktor yang mempengaruhi kinerja partisipasi masyarakat karena keterbatasan cakrawala pengetahuan disebabkan lingkup aktivitas mereka yang sempit atau karena ketidakberdayaan mereka untuk mengakses serta mengeksplorasi kesempatan dunia luar yang ada di sekeliling mereka. Publik memerlukan informasi yang memadai terkait dengan suatu program tertentu yang menyangkut kepentingan publik dan publik perlu dikonsultasikan tentang berbagai masalah. Namun tidak semua warga mau dimintai pendapatnya dan tentu ada banyak masalah yang kurang menarik bagi kebanyakan orang. *The challenge is to determine which issues require input from the public, which segments of the public should be consulted, and how this required input can be obtained most effectively* (Sewell & Phillips, 1979). *But the larger responsibility of citizens is not just to judge when officials behave badly, but also to provide feedback on their performance* (Lathrop, 2010).

Secara umum masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata Gurun Telaga Biru namun ada batasannya, tidak sebebas-bebasnya. Partisipasi masyarakat termasuk kreasi yang mungkin dibuat oleh masyarakat jika tidak dibatasi dan diatur dengan peraturan memungkinkan munculnya keributan (Akbar, informan). Ketergantungan terhadap pemerintah dan investor *tinggi*. Kondisi ini berakibat pada kurangnya respons, antusiasme, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan asset-aset di wilayah mereka (Dewi, 2013). Dalam pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga

Biru, tidak ada batasan untuk masyarakat kecuali aturan kelompok ada batasan. Untuk pengembangan pariwisata tidak ada batas (Azroy, informan).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat *disimpulkan* bahwa partisipasi dalam rangka pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru, Desa Busung, Kabupaten Bintan tidak bersifat menyeluruh untuk seluruh lapisan masyarakat karena pengembangan Desa Wisata tersebut dikelola oleh sekelompok masyarakat yang bekerja bersama atau dikoordinir oleh BUMDes Desa Busung, Kabupaten Bintan. Secara umum partisipasi menjadi aspek yang penting dalam pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru, Kabupaten Bintan karena bentuk hubungan kerja di antara anggota kelompok bukan bersifat top down tapi memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam bentuk pemikiran atau saran pengembangan desa wisata tersebut. Partisipasi dari pemerintah daerah lebih dalam bentuk pembimbingan dan pembinaan pengelolaan desa wisata termasuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar pihak yang terkait dalam pengembangan desa wisata tersebut. Peran utama dari pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru sendiri dilakukan oleh BUMDes Desa Busung, Kabupaten Bintan. Saran dari hasil penelitian ini adalah BUMDes lebih intens dalam mendorong partisipasi khususnya anggota kelompok dalam pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru karena dampak dari wabah Covid-19 menyebabkan aktivitas pengembangan Desa Wisata Gurun Telaga Biru kurang optimal agar pendapatan dari anggota masyarakat dapat lebih meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank (2012). *Strengthening Participation for Development Results: An Asian Development Bank Guide to Participation*. Asian Development Bank. Philippines
- Bowles, S., & Gintis, H. (2002). Social capital and community governance. *The economic journal*, 112(483), F419-F436.  
<https://www.jstor.org/stable/798455>
- Creighton, J. L. (2005). *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement*. John Wiley & Sons, Inc. San Francisco
- Dewi, M. H. U., Andeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiwulih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*. 2 (2). 129-139.  
[https://www.academia.edu/29060110/PENGembangan\\_Desa\\_Wisata\\_Berbasis\\_Partisipasi\\_Masyarakat\\_Lokal\\_Di\\_Desa\\_Wisata\\_Jatiluwh\\_Tabanadan\\_Bali\\_ad\\_andeli](https://www.academia.edu/29060110/PENGembangan_Desa_Wisata_Berbasis_Partisipasi_Masyarakat_Lokal_Di_Desa_Wisata_Jatiluwh_Tabanadan_Bali_ad_andeli)
- Denhardt, R., & Denhardt, J. (2007). The New Public Service: Serving, Rather Than Steering. 60(6). 549-559  
<http://dx.doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Febrianingrum, S.R., Miladan, N, & Mukaromah, H. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pariwisata Pantai di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*. 1(2). 130-142.  
<https://jurnal.uns.ac.id/jdk/article/view/14762/21916>
- Fikri, Z., & Septiawan, Y. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 2(1), 24-32.  
<https://doi.org/10.51747/publicio.v2i1.519>
- Hardiansyah, S., & Marhadi, A. (2019). Persepsi Masyarakat Tangkeno terhadap Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Tangkeno Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana). *Jurnal Sosial dan Budaya*. 8(2). 158-166.  
<https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v8i2.590>
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*. 3(2). 105-117.  
<https://doi.org/10.31294/par.v3i2.1383>
- Imron, M. B (2015). Meretas Jalan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Desa Wisata Panglipuran Bali. *Jurnal Bina Praja*, 7(4). 279-288.  
<https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.279-288>
- Juddin, D. F. (2019). Kerja sama Pemerintah dan Swasta di dalam Pengembangan Desa Wisata Hijau di Desa Sesaot, Desa Sembalun dan Desa Bilebante Pulau Lombok. Tesis Universitas Terbuka. Jakarta
- Jalunggono, G. & Destiningsih, R. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dan Dampak Ekonomi Pariwisata di Desa Wisata Kutawaru Kabupaten Cilacap. 3(2).  
<http://dx.doi.org/10.31002/rep.v3i2.1039>
- Kemendes PDTT (2019, Agustus). Pemerintah Dorong Terbentuknya Desa Wisata. Diakses pada 7 April 2023 dari:

- <https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2937/pemerintah-dorong-terbentuknya-desa-wisata>.
- Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). Open government: Collaboration, transparency, and participation in practice. " O'Reilly Media, Inc."
- Litvack, J. I., Ahmad, J., & Bird, R. M. (1998). Rethinking Decentralization in Developing Countries. World Bank Publications.
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa wisata menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35-43. <https://doi.org/10.35829/magisma.v7i1.38>
- Nurpeni, N. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Ekowisata. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*. 11(01). 1731-1736. <https://www.neliti.com/id/publications/125785/partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan-pengembangan-kawasan-ekowisata>
- Panama, N. (2018, April). PAD Bintang terbesar dari pajak daerah. Diakses pada 9 April 2023 dari: <https://kepri.antaranews.com/berita/47879/pad-bintang-terbesar-dari-pajak-daerah>
- Raharjana, D. T. (2012). Membangun pariwisata bersama rakyat: Kajian partisipasi lokal dalam membangun Desa wisata di dieng plateau. *Jurnal Kawistara*, 2(3). 225-328. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3935>
- Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Desa Wisata Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. *Prosiding KS*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13643>
- Rohmadin, Sulthon (2016). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Politik Pemerintahan*. 9(1). 141-153. <https://www.e-jurnal.com/2017/02/strategi-pengembangan-kawasan-wisata.html>
- Sewell, W. D., & Phillips, S. D. (1979). Models for the Evaluation of Public Participation Programmers. *Natural Resources Journal*, 19(2), 337-358. <https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol19/iss2/6/>
- Sharma, C. K. (2014). Governance, governmentality, and governability: Constraints and possibilities of decentralization in South Asia. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61430/>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 38-44. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14208/6871>
- Bintan, B. (2019, Juli). Gurun Telaga Biru Hipnotis Tim Millenial Tourism. Diakses pada 9 April 2023 dari: <https://lifestyle.sindonews.com/berit>

- [a/1419839/156/gurun-telaga-biru-hipnotis-tim-millennial-tourism](https://doi.org/10.1419839/156/gurun-telaga-biru-hipnotis-tim-millennial-tourism)
- Stacey, S., Ralph, D. (2003). *Strategic Management and Organizational Dynamics: The Challenge of Complexity*. Prentice Hall. London
- Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22-26.  
<https://dx.doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8>
- Suharjono, S., Sarasa, A. B., Priyosetyawan, P. & Mustaqim, A. H. (2019, November). Desa Wisata, Potensi Andalan Pariwisata di Indonesia. Diakses pada 6 April 2023 dari:  
<https://ekbis.sindonews.com/berita/1454806/34/desa-wisata-potensi-andalan-pariwisata-di-indonesia>.
- Tedi, K. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Atas Pengelolaan Keuangan Desa Wisata (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kecamatan Banjar). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 18-27.  
<https://doi.org/10.23887/vjra.v9i1.24660>
- Zakaria, F., & Suprihardjo, R. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandung Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Jurnal teknik ITS*, 3(2), C245-C249.  
<http://dx.doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7292>